

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Klikpendidikan.id
Media Cetak	

# Rawan Penyalahgunaan, Program Sekolah Swasta Gratis di DKI Jakarta Butuh Regulasi

[Nurul Huda KP](#)

Sesuai amanat konstitusi, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan pemerintah harus hadir untuk memastikan itu.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satunya adalah program sekolah gratis.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk menghapus hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh keluarga kurang mampu dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Itu juga yang sedang dilakukan Pemprov [DKI Jakarta](#), mereka terus berupaya untuk memberikan akses pendidikan dasar bagi warganya.

Provinsi dengan populasi penduduk sebanyak 11,35 juta jiwa ini berencana menggratiskan biaya sekolah swasta pada tahun 2025 mendatang.

Hal itu dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis antara DPRD Komisi E dengan Dinas Pendidikan.

MoU itu yang ditandatangani pada Jumat 23 Agustus 2024 lalu itu menyepakati bahwa pelaksanaan program sekolah gratis berlaku tahun depan.

Namun, sebelum menerapkan kebijakan terkait program ini, Pemprov DKI Jakarta diminta membuat regulasinya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Yusuf mengungkapkan bahwa [regulasi](#) yang dibuat nanti untuk mengantisipasi penyalahgunaan program sekolah gratis.

Menurutnya antisipasi itu perlu dilakukan agar program ini bisa tepat sasaran dan melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Namun, lanjut Yusuf, jika tidak ada kejelasan terkait regulasi, maka bisa saja warga dari luar daerah ikut berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di Jakarta.

Dia khawatir kondisi demikian akan berdampak bagi anak-anak warga Jakarta, mereka kehabisan kuota sekolah gratis.

"Jangan sampai kalau sudah sekolah gratis, masyarakat di luar DKI Jakarta menyekolahkan anaknya ke DKI Jakarta hanya untuk mendapatkan fasilitas itu," ujar Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 11 September 2024.

Program [sekolah swasta gratis](#) merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Untuk merealisasikan program itu diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp2,3 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Jumlah ini dinilai lebih kecil dibandingkan subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), yakni senilai Rp2,8 triliun.

Selain pematangan terkait anggaran, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta, untuk menjadi mitra dalam program sekolah gratis.

Nantinya, sekolah-sekolah itu, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan bekerjasama untuk menyukseskan program yang jadi terobosan di DKI Jakarta. \*\*\*